

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Soemitro (1990:5, dalam Waluyo, 2010:3) pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan kepada kas Negara guna membiayai pengeluaran umum dalam pemerintahan. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak di tahun 2012 yang mencapai Rp 980,1 triliun, sedangkan total penerimaan Negara dan hibah adalah Rp 1.335,7 triliun. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa 73,37% penerimaan negara berasal dari pajak. Penerimaan Negara tersebut berasal dari berbagai jenis pajak, yaitu pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan, cukai, bea masuk, bea keluar, serta pajak lainnya. Pajak penghasilan merupakan sumber terbesar bagi penerimaan negara. Berdasarkan data realisasi APBN tahun 2012, pajak penghasilan yang diterima oleh negara sebesar Rp 464,7 triliun atau sebesar 47,41% dari total penerimaan pajak. (<http://iamtaxactor.blogspot.com>)

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean) baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP) oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean

atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. PPN hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu rantai produksi. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP maupun JKP adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan juga dapat diartikan sebagai selisih antara harga jual dan harga beli. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Dirjen Pajak telah melakukan berbagai cara, seperti memperluas subjek dan objek pajak maupun menjangking wajib pajak baru. Indonesia mulai menganut *self assesment system* dalam pemungutan pajaknya sejak reformasi perpajakan. Menurut Waluyo (2010:17), *self assesment system* memberikan kepercayaan terhadap seluruh wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang pada satu periode tertentu. *Self assesment system* mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun hal tersebut dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan penuh. Perubahan Undang-Undang (UU) 8 tahun 1983 menjadi UU 42 tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa dalam sasaran pelaksanaannya. UU PPN menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

serta dapat mengamankan dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai hasil pembangunan nasional.

Will dan Kwok (2011: 4-7, dalam Agoes 2013:1) mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang telah terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna. Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Kegiatan pencatatan dan penggolongan merupakan proses yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang setiap terjadi transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan laporan dan penganalisisan biasanya hanya dilakukan pada waktu tertentu. Akuntansi dibutuhkan oleh berbagai pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal. Jika kaitannya dengan PPN, Akuntansi harus dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Luluhan (2013). Dalam penelitiannya, mengungkapkan, menjelaskan dan memberikan gambaran permasalahan mengenai kesesuaian penerapan penghitungan,

pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPN pada perusahaan, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Darmayanti (2012). Dalam penelitiannya, mengungkapkan dengan adanya pajak maka dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya pada penjualan produk saja tetapi jasa juga dikenakan biaya pajak selain itu, semua yang menghasilkan keuntungan akan dikenakan pajak. Perubahan struktur ekonomi mengakibatkan semakin meningkatnya peran pajak, khususnya PPN, terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Menyadari akan hal ini, penggalan dan usaha peningkatan penerimaan pajak terus diupayakan.

Objek penelitian ini adalah perusahaan CV. AGH yang bertempat di Surabaya. CV. AGH adalah perusahaan yang bergerak pada penjualan barang-barang teknik, misalnya seperti kabel, *sparepart* mesin, alat-alat listrik (saklar, stop kontak, sekring, dll), jenis-jenis lampu, mur, baut. Barang-barang yang berat dan besar tidak tersedia langsung di CV. AGH. Pelanggan yang ingin membeli barang tersebut harus memesannya terlebih dahulu, lalu CV. AGH memesan barang tersebut. Hanya barang-barang yang ringan saja yang terdapat pada CV. AGH, contohnya seperti mur, baut, dan saklar. CV. AGH memiliki banyak pelanggan tetap, banyak pelanggan yang sudah mengetahui cara memesan barang di CV. AGH. Tidak adanya persediaan barang di CV. AGH membuat para pelanggan memberikan contoh barang yang ingin dipesan dari CV. AGH. Setiap transaksi penjualan maupun pembelian pada CV. AGH

dikenakan PPN. CV. AGH sudah menerapkan PPN sehingga perusahaan ini dikukuhkan menjadi PKP. Sebagai PKP harus memenuhi kewajiban PPN dalam usahanya. Perusahaan harus melakukan proses perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPN. Penerapan PPN mulai dari perhitungan, pencatatan sampai pelaporan harus dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku. PPN dapat berfungsi untuk melindungi kepentingan negara, agar pendapatan negara tidak berkurang. Alasan peneliti memilih judul ini karena PPN melekat dengan transaksi perdagangan, bagi pihak penjual disebut dengan PPN Keluaran sedangkan bagi pihak pembeli disebut dengan PPN Masukan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPN dan perlakuan akuntansi atas PPN pada CV. AGH. Harapan peneliti meneliti CV. AGH adalah dapat memberikan gambaran mengenai perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak dan pencatatan akuntansi yang benar.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah adalah :

1. Bagaimana perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPN pada CV. AGH Surabaya?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas PPN pada CV. AGH Surabaya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPN pada CV. AGH Surabaya.
2. Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi atas PPN pada CV. AGH Surabaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu deskripsi penerapan PPN pada CV. AGH.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai penerapan PPN, yang dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi: desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran tiap variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bab ini dibahas mengenai simpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian, keterbatasan, dan saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya.